

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Penyidikan Kepribadian <i>Dark Triad</i> terhadap Propensitas Berkomitmen Kejahatan Keras Putih, Maghfirah & Putri, (2019)	Beberapa aturan hukum yang telah diterapkan belum mampu mencegah niat untuk melakukan Kejahatan Keras Putih. Fenomena kejahatan keras putih masih terjadi karena keunikan individu terlindungi. Tidak semua individu yang tertekan, serakah, dan oportunistik sebenarnya melakukan tindakan kejahatan keras putih. <i>Dark Triad</i> adalah ciri kepribadian	<i>Economic theory of crime behavior</i> dan <i>dark triad theory</i>	Deskriptif kualitatif	Dapat disimpulkan bahwa semua komponen kepribadian <i>dark triad</i> memiliki pengaruh positif pada kecenderungan untuk melakukan kejahatan keras putih. Jika tidak ada kemungkinan tertangkap, niat untuk melakukan kejahatan keras putih akan lebih tinggi. Namun, jika ada kemungkinan tertangkap 10 persen, niat akan lebih rendah.

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>yang memiliki tiga elemen negativitas seperti Machiavellianisme, narsisme, dan psikopati. <i>Dark Triad</i> memiliki hubungan psikologis yang kuat dengan tindakan penipuan. Saat kepribadian <i>dark triad</i> digabungkan, mereka dianggap prediktif tidak berperasaan, pencarian diri, dan sikap dan perilaku manipulatif.</p>			
2.	<p>Sisi Lain Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sebuah Studi Dramaturgi, Harziani et al., (2017)</p>	<p>Kasus <i>fraud</i> di sektor Pemerintahan dapat terjadi di Institusi-Institusi pendidikan di kota-kota besar maupun kota-kota kecil dengan modus operasi yang berbeda. Dalam kasus pengadaan</p>	<p>Teori <i>fraud</i> dan teori dramaturgi</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Fakultas Y terindikasi mengandung <i>fraud</i>. Bentuk indikasinya berupa pelibatan rekanan dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Pemaknaan atas <i>fraud</i>, menimbulkan persepsi yang berbeda tergantung sudut pandang aktor masing-masing. Bagi rekanan praktek pemberian hadiah atau <i>sharing</i> keuntungan bukan lagi sebagai kerelaan sekedar ucapan terima kasih, namun lebih kepada keharusan</p>

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>barang dan jasa baik pengguna maupun rekanan memainkan perannya ketika berhadapan satu sama lain.</p> <p>Apalagi jika dilihat dari sisi pengguna banyak pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengadaan. Pihak-pihak ini berperan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah dibebankan. Selayaknya pertunjukan drama, kelengkapan pertunjukan juga dipersiapkan oleh seorang aktor drama kehidupan. Kelengkapan pertunjukan ini yang nantinya menjadi penyuguh warna dan</p>			<p>untuk memperlancar proses pengadaan sekaligus melanggengkan kekuasaannya di Fakultas Y. Sedangkan bagi aparaturnya pemberian hadiah lebih kepada kelaziman, pemberian yang memang diterima sebagai bentuk imbalan atas kerja keras untuk melaksanakan proses pengadaan dari awal hingga akhir. Bagi staff pengadaan, lagi-lagi harus mengikuti proses yang sudah terbentuk, kelaziman yang sudah membentuk menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya, pemaknaan fraud di Fakultas Y masih menjadi sesuatu yang subjektif, tergantung pandangan masing-masing aktor dan lingkungan kerja yang melatarbelakangi. Sebagian aktor mengetahui bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang mengarah pada tindakan <i>fraud</i>, namun adanya tekanan dari dalam diri dan lingkungan sekaligus kesempatan untuk mencurangi aturan menjadi alasan pembenar bagi aktor untuk melakukan hal ini. Hal ini seakan memberi kemasukan lain bagi aktor untuk membudayakan sesuatu yang salah.</p>

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
		kehidupan dalam panggung drama.			
3.	Dinamika Ketidakkonsis tenan pengelolaan Dana Desa: Perspektif Dramaturgi, Fatmawati, (2018)	Kurangnya transparansi pada pengelolaan keuangan desa menyebabkan pencapaian tujuan pengelolaan menjadi kurang efektif, meskipun pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat terselesaikan dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa akan mempengaruhi keberhasilan dari tujuan pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Terdapat beberapa desa yang diduga melakukan manipulasi laporan	Teori dramaturgi	Deskriptif kualitatif	Keputusan dari pemerintah desa untuk mengalihkan dana alokasi dana desa di beberapa aspek. Pengalihan dana yang terjadi menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara anggaran belanja desa untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan yang terdapat di APBDesa dengan realisasinya.

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>pertanggungja waban penggunaan dana desa untuk melakukan pencairan dana desa tahap berikutnya, meskipun masih terdapat kegiatan pembangunan dari dana desa yang belum terselesaikan. Adanya dugaan ketidaksesuaia n kegiatan yang ditulis dalam banner dengan realisasinya yang disuarakan oleh masyarakat desa.</p>			

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Dinamika Kisah “Si Kencur” dalam Memerbaiki Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Retribusi Pelayanan Pasar: Suatu Kajian Dramaturgi, Yunarto et al., (2017)	Panggung sandiwara birokrasi merupakan sebuah analogi yang digunakan untuk menggambarkan dinamika kisah sandiwara yang terjadi di birokrasi. Pada panggung sandiwara birokrasi di sektor publik, terdapat berbagai kisah atau cerita yang menyoroti tentang kelemahan dan keterbatasan pada sistem pemerintahan baik di panggung pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Masih banyak terjadi fenomena distorsi laporan keuangan,	Teori dramaturgi	Deskriptif kualitatif	Secara umum dapat disimpulkan, <i>performance</i> atau pertunjukan proses penerimaan kas retribusi pelayanan pasar dipengaruhi oleh beberapa komponen utama yaitu: peran para aktor, skrip sebagai petunjuk pelaksanaan peran, properti yang digunakan dan panggung ( <i>stage</i> ) yang baik untuk mendukung pertunjukan. Dinamika konflik sosial yang terjadi akibat interaksi para aktor memang tidak dapat dihindari, yang terpenting adalah bagaimana mengolah permasalahan dan konflik ( <i>conflict management</i> ) tersebut menjadi konstruktif. Upaya memperbaiki sistem informasi akuntansi penerimaan kas retribusi pasar tidak dapat berjalan sendiri. Hal ini dapat terwujud dengan keselarasan tujuan dan dukungan peran para aktor baik yang berada di depan, belakang dan luar panggung, penataan <i>stage</i> yang lebih untuk memperlancar komunikasi dan informasi, penggunaan teknologi informasi (properti) yang dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat (relevan, akurat, lengkap, dapat dipahami dan transparan), dan penggunaan strategi yang bersifat asosiatif.

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
		menyajikan informasi normatif, tidak sesuai dengan peraturan, dan dikemas dengan baik melalui tipuan hiasan angka dalam laporan keuangan sehingga menimbulkan kerugian negara.			
5.	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada PT Bulan Terang Utama, Sitepu (2016)	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> menjadi daftar baru bagi semua perusahaan, tanpa terkecuali di bisnis properti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bulan Terang Utama.	Teori <i>Good Corporate Governance</i> merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan ( <i>stakeholders</i> ) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan	Deskriptif Kualitatif	PT Bulan Terang Utama telah menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Dari sisi transparansi, perusahaan sudah terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai informasi yang berhubungan dengan perusahaan. Selain itu PT BTU juga sudah menunjukkan tanggungjawabnya sebagai usaha berbadan hukum dengan menaati hukum negara yang berlaku. Perusahaan juga sudah mandiri dengan tidak adanya intervensi dari pihak lain maupun tidak adanya sikap saling melempar tanggung jawab. PT BTU juga sudah memperlakukan seluruh <i>stakeholder</i> secara sama tanpa ada pengistimewaan tertentu. Dari sisi akuntabilitas, PT BTU tidak terlalu teoritis dalam

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
			komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.		menerapkan strukturnya karena melihat lagi kondisi perusahaan. Selain itu tidak ditemukan adanya dokumen tertulis mengenai visi dan misi perusahaan maupun kode etik perusahaan.
6.	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> : Studi Deskriptif pada Perusahaan Keluarga Jasa Properti, Christian & Mustamu (2013)	Perusahaan keluarga memberikan kontribusi yang besar pada kegiatan ekonomi. Konflik yang timbul, seperti konflik kepentingan di antara para <i>stakeholder</i> seringkali terjadi di dalam perusahaan. Untuk dapat menyelesaikan konflik maka perlu memahami penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .	Teori <i>Good Corporate Governance</i>	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari penerapan-penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> tersebut, masih ada sebagian dari prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang belum dilaksanakan dengan baik, yaitu prinsip <i>accountability</i> dan <i>responsibility</i>.</li> <li>2. Prinsip <i>transparency</i> telah dijalankan dengan baik dimana perusahaan berusaha menyediakan informasi bagi karyawan secara transparan dan terbuka.</li> <li>3. Prinsip <i>accountability</i> yang dijalankan di perusahaan kurang baik.</li> <li>4. Prinsip <i>responsibility</i> juga sudah dijalankan, ada yang baik dan ada yang kurang baik.</li> <li>5. Prinsip <i>independency</i> dalam perusahaan sudah dijalankan dengan baik, dimana tidak saling mendominasi dan tidak ada intervensi dari pihak lain.</li> <li>6. Prinsip <i>fairness</i> yang dijalankan di perusahaan sudah baik.</li> </ol>
7.	Pelanggaran Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (Studi Kasus	Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal	Teori <i>Good Corporate Governance</i>	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip-Prinsip GCG yang dilanggar oleh PT Bank Lippo Tbk. yaitu Prinsip Transparansi dan Prinsip Akuntabilitas.</li> <li>2. Sanksi hukum atas</li> </ol>

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	PT Bank Lippo Tbk), Budiartini et al., (2012)	<p>harus selalu mengikuti peraturan yang ada dan telah ditetapkan oleh pasar modal itu sendiri. Terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan beberapa alasan yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme serta kelemahan peraturan. Salah satu contoh yang merupakan pelanggaran prinsip GCG di pasar modal adalah kasus laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk.</p>			<p>pelanggaran Prinsip GCG di Pasar Modal yang dilakukan oleh PT Bank Lippo Tbk adalah berupa sanksi administratif.</p>
8.	Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada	Semua perusahaan milik negara agar mengikuti	Teori <i>Good Corporate Governance</i>	Deskriptif Kualitatif	1. Prinsip <i>transparency</i> atau keterbukaan sudah dijalankan perusahaan ini dalam hal sistem informasi strategi pemasaran, kebijakan

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	Perusahaan Properti PT Multi Royu Indonesia, Putra (2014)	<p>prinsip <i>Good Corporate Governance</i> sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik dan tidak muncul masalah di kemudian hari. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada PT. Multi Royu Indonesia.</p>			<p>perusahaan, dan sistem pembayaran gaji dan komisi, tetapi visi misi, struktur perusahaan dan peraturan perusahaan tidak jelas hanya disampaikan secara lisan dan tidak bentuk tertulis.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Prinsip <i>accountability</i> atau akuntabilitas pada perusahaan ini tidak dijalankan dengan baik, karena perusahaan sudah memiliki sistem yang baik tetapi para pekerjanya tidak menjalankan sesuai dengan prinsip ini dengan melanggar beberapa peraturan perusahaan.</li> <li>3. Prinsip <i>responsibility</i> atau pertanggung jawaban telah dijalankan oleh perusahaan dalam kepedulian sosial menaati peraturan pemerintah tetapi dalam hal keselamatan dan kesehatan para pekerja kurang diperhatikan.</li> <li>4. Prinsip <i>independency</i> atau kemandirian di PT. Multi Royu Indonesia dijalankan oleh perusahaan karena tidak ada tekanan dari luar perusahaan dan tidak ada yang mendominasi di dalam perusahaan.</li> <li>5. Prinsip <i>fairness</i> atau kewajaran di perusahaan ini sudah dijalankan dengan tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang berbeda terhadap pihak tertentu di dalam perusahaan, memberikan kesempatan yang sama, dan memberikan hak para pekerja dengan pantas</li> </ol>

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
					atau sewajarnya.
9.	Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada PT Wang Konstruksi Indonesia, Supit (2016)	Implementasi prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) menjadi suatu poin yang penting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mampu bertahan dan bertumbuh sekaligus untuk menumbuhkan kepercayaan dan keberlanjutan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Wang Konstruksi Indonesia.	Teori <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar.	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip <i>Transparency</i> dalam perusahaan PT Wang Konstruksi Indonesia dilihat dari penyampaian visi dan misi perusahaan secara lisan kepada karyawan namun tidak tertulis.</li> <li>2. Prinsip <i>Accountability</i> yang dijalankan oleh PT Wang Konstruksi Indonesia masih belum dilaksanakan dengan maksimal.</li> <li>3. Prinsip <i>Responsibility</i> dilakukan perusahaan dengan mentaati regulasi dan undang-undang yang berlaku.</li> <li>4. Dalam penerapan prinsip <i>Independency</i> ini PT Wang Konstruksi Indonesia tidak terlihat adanya intervensi dari pihak luar dan negara.</li> <li>5. Dalam penerapan prinsip <i>Fairness</i>, PT Wang Konstruksi Indonesia memperlakukan setiap karyawannya dengan setara yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.</li> </ol>
10.	<i>Corporate Governance and Dividend Reinvestment Plans: Insights from Imputation Tax</i> in	<i>The supply of Dividend Reinvestment Plans (DRPs) in relation to corporate governance and imputation tax</i>	<i>The agency theory</i>  Teori keagenan	<i>Quantitative Descriptive</i>  Deskriptif Kuantitatif	<i>Good governance should consider a variety of clientele demands for dividend policy, and investors perceive that good governance leads to an increasing share price. Also confirmed that the positive association between governance and DRP was weakened by the</i>

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	<p><i>Australia</i></p> <p>Tata Kelola Perusahaan dan Rencana Reinvestasi Dividen: Wawasan dari Pajak Imputasi di Australia, Abedi et al., (2020)</p>	<p><i>system in Australia</i></p> <p>Penyediaan Dividend Reinvestment Plans (DRPs) sehubungan dengan tata kelola dan sistem pajak imputasi di Australia</p>			<p><i>imputation tax, the more DRP and thus the greater accumulation of cash led by good governance is weakened when a firm adopts a franked dividend and further increase in cash retentions caused by the tax credits generated by DRP</i></p> <p>Tata kelola yang baik harus mempertimbangkan berbagai permintaan klien untuk kebijakan dividen, dan investor memandang bahwa tata kelola yang baik mengarah pada peningkatan harga saham. Juga menegaskan bahwa hubungan positif antara tata kelola dan DRP diperlemah oleh pajak imputasi, semakin banyak DRP dan dengan demikian semakin besar akumulasi kas yang dipimpin oleh tata kelola yang baik dilemahkan ketika perusahaan mengadopsi <i>franked dividen</i> dan peningkatan lebih lanjut dalam retensi kas yang disebabkan oleh kredit pajak yang dihasilkan oleh DRP</p>

Sumber: Data penelitian diolah, 2021

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian adalah penggunaan dramaturgi sebagai metode kajian dalam membahas fenomena. Sedangkan untuk perbedaannya adalah fokus rencana penelitian. Pada penelitian ini *dark triad* digunakan sebagai identifikasi “aktor” sebagai informan dan pengungkapan akuntabilitas sebagai bagian kunci dalam *Good*

*Corporate Governance*. Selain itu, perbedaan lain terletak dari rencana penelitian adalah obyek penelitian yang akan dilaksanakan di PT.XXX.

## **2.2. Tinjauan Teori**

### **2.2.1. Teori Agensi**

Teori Agensi atau *Agency theory* merupakan sebuah konsep dimana suatu perusahaan menggunakan agen untuk bekerja atas nama perusahaan tersebut. Penggunaan agen disebabkan karena para pekerja tidak selalu memenuhi harapan pemberi kerja sehingga kepentingan dari pekerja dan pemberi kerja tidak memiliki keselarasan (Dewi, 2014: 65 dalam Susanti, 2019). *Agency Theory* menjelaskan tentang perjanjian antara beberapa pihak (*principals*) dengan orang lain (*agents*) dimana pihak *principals* mendelegasikan wewenang terkait pengambilan keputusan kepada *agent* (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Susanti, 2019). Prinsip utama dari teori keagenan adalah adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principle*) yaitu pemilik atau pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama (Sulistiawan Dedhy dan Januarsari Yeni, 2011 dalam Amalia, 2018). Masalah keagenan muncul karena terdapat konflik perbedaan pendapat (kepentingan) antara pemilik (*principle*) dengan manajemen (*agent*) (Siallagan dan Machfoedz, 2006 dalam Amalia, 2018).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Amalia (2018) hubungan keagenan merupakan suatu hubungan dimana pemilik perusahaan (*principle*) mempercayakan pengelolaan perusahaan oleh orang lain yaitu

manajer (*agent*) sesuai dengan kepentingan pemilik (*principle*) dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada manajer (*agent*). Manajer dalam menjalankan perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana diamanahkan oleh pemilik (*principle*) yaitu meningkatkan kemakmuran prinsipal melalui peningkatan nilai perusahaan, sebagai imbalannya manajer (*agent*) akan mendapatkan gaji, bonus atau kompensasi lainnya. Manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan, lebih mengetahui informasi internal, dan mengetahui prospek perusahaan di masa yang akan datang dibanding dengan pemilik atau pemegang saham, oleh karena itu manajer berkewajiban memberikan informasi atau sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik (Ujiyantho dan Pramuka, 2007 dalam Amalia, 2018). Tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi tersebut dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi. Kenyataannya dalam menjalankan kewajibannya pihak manajer (*agent*) mempunyai tujuan lain yaitu mementingkan kepentingannya sendiri, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik keagenan, yaitu konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dengan pemilik atau pemegang saham (*principle*) (Zuhriya & Wahidahwati, 2015 dalam Amalia, 2018).

### 2.2.2. Teori *Stakeholder*

Pendekatan *stakeholder* muncul pada pertengahan tahun 1980-an. Latar belakang pendekatan *stakeholder* adalah keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang responsif terhadap masalah yang dihadapi para manajer saat itu yaitu perubahan lingkungan. Tujuan dari manajemen *stakeholder* adalah untuk merancang metode yang digunakan untuk mengelola berbagai kelompok dan hubungan yang dihasilkan dengan cara yang strategis. *Stakeholder* adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder* dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk *going concern*, meliputi *shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu pemerintah dan komunitas. Kelompok *stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai seseorang yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya.

Teori *stakeholder* menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana (Deegan, Rankin, & Voght, 2000 dalam Sri Rokhlinasari, 2016). Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan

wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*. Teori *stakeholder* memiliki bidang etika (moral) dan manajerial. Bidang etika berargumen bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh *stakeholder*.

Teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan *stakeholder*, sehingga aktivitas perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan dari *stakeholder*. Semakin kuat *stakeholder*, maka perusahaan harus semakin beradaptasi dengan *stakeholder*. Pengungkapan sosial dan lingkungan kemudian dipandang sebagai dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*. Beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*, yaitu : 1) Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka. 2) Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan. 3) Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan. 4) LSM dan pencinta lingkungan makin vokal dalam mengkritik perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.

Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan

di lingkungan perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori *stakeholder* adalah untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas mereka, dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi *stakeholder*. Pada kenyataannya, inti keseluruhan teori *stakeholder* terletak pada apa yang akan terjadi ketika korporasi dan *stakeholder* menjalankan hubungan mereka (Sri Rokhlinasari, 2016).

### **2.2.3. Good Corporate Governance**

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, *Good Corporate Governance* adalah regulasi terkait hubungan hak dan kewajiban antara pihak internal perusahaan dengan *stakeholder* dalam mengelola dan mengendalikan perusahaan (Arief, 2016: 3 dalam Susanti, 2019). *Good Corporate Governance* juga merupakan dasar perekonomian pasar yang berkaitan dengan kepercayaan baik terhadap pengelola perusahaan dan iklim usaha negara (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006 dalam Susanti, 2019). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu hal yang berkaitan dengan pengarahan dan pengendalian sumberdaya perusahaan dalam memenuhi kepentingannya kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

KNKG (2006) menjelaskan lebih detail mengenai tujuan diterapkannya GCG, sebagai berikut:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Adapun lima prinsip penerapan *Good Corporate Governance* yaitu sebagai berikut:

## 1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan keterbukaan dalam pemberian informasi yang relevan dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang mudah diakses serta mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Transparansi disebut juga jendela yang menjadi jalur informasi masuk dan informasi keluar. Jendela transparansi tersebut di antaranya adalah pelaporan kepada publik mengenai informasi kinerja perusahaan maupun kinerja produk, penyediaan website yang bisa diakses dengan mudah, keikutsertaan perusahaan dalam pameran dagang, penyelenggaraan *open house*, penyampaian informasi kepada lembaga regulator, ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, serta pertemuan tahunan pemegang saham.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan bentuk dari kejelasan struktur dan fungsi perusahaan yang harus dikelola secara benar sesuai kepentingan *stakeholders*. Selain membahas kejelasan struktur dan fungsi, akuntabilitas juga membahas mengenai etika bisnis. Etika bisnis adalah pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk kegiatan berinteraksi dengan seluruh *stakeholders*. Rumusan etika bisnis dijabarkan lebih lanjut dalam kode etik (*code of conduct*) perusahaan. Kode etik mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah, kepatuhan terhadap

peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Responsibilitas adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang berupa kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Undang-undang yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

4. *Independensi (Independency)*

Prinsip independensi menuntut perusahaan untuk bertindak secara mandiri sesuai fungsi dan peran yang dimiliki masing-masing organ tanpa adanya tekanan. Perusahaan dikelola secara mandiri sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak saling

melempar tanggung jawab, serta perusahaan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain yang memiliki kepentingan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip kesetaraan menuntut adanya perlakuan yang adil dan wajar dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran, termasuk kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Pemangku kepentingan adalah mereka baik individu, sekelompok orang, komunitas atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan. Pemangku kepentingan tersebut antara lain terdiri dari pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan, konsumen, kreditur, media, pemerintah, dan kompetitor.

Keberhasilan *Good Corporate Governance* didukung oleh mekanisme *Corporate Governance*. Mekanisme *Corporate Governance* merupakan kebijakan dan model hubungan antara pihak yang melakukan pengambilan keputusan dengan pihak yang melakukan pengendalian sehingga keputusan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan (Dewi, 2014: 83 dalam Susanti, 2019). Mekanisme *Corporate Governance* terdiri dari pengendalian internal dan eksternal perusahaan (Beiner et al., 2003 dalam Susanti, 2019).

Mekanisme pengendalian internal berasal dari dalam perusahaan yang terdiri dari ukuran komisaris, dewan direksi, komite audit, proporsi direktur independen, komisaris independen dan kepemilikan manajerial. Mekanisme pengendalian internal ini berdampak langsung pada manajemen perusahaan sehingga mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerjanya. Pengendalian eksternal berasal dari luar perusahaan yaitu kepemilikan institusional yang merupakan pengendalian oleh pasar.

#### **2.2.4. Akuntabilitas**

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Menurut Endang (2017) akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengendalian dan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Menurut Nugraheni, dkk (2017: 153) akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan dan langkah-langkah atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu akuntabilitas membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa perundang-

undangan maupun dalam bentuk komitmen dan dukungan masyarakat, baik pada level budaya (individu) maupun pada level lembaga.

Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. *Accountability* adalah konsep yang memiliki beberapa makna. terminologi ini sering digunakan dengan beberapa konsep seperti *answerability*, *rensponsibility*, dan *terminology* lain yang berkaitan dengan “*the expectation of account-giving*” (harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat). Dengan demikian *accountability* mencakup dengan harapan atau asumsi perilaku hubungan antara pemberi dan penerima mandat (Setiyono, 2014: 81). Dalam bidang ilmu akuntansi, akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjelas. Suatu organisasi dikatakan akuntabel jika organisasi tersebut memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk di dalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan seseorang untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan atas semua hasil pekerjaan yang ditangguhkan kepadanya. Bagus atau buruknya hasil pekerjaan yang telah diselesaikan seseorang, jika ia mampu menjelaskan, mempertanggungjawabkan dan dapat disalahkan maka pekerja tersebut telah bersikap akuntabel.

Menurut Endang (2017) yang mengutip pernyataan Effendi, prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk melakukan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten.
- c. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- d. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dan manajemen organisasi dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Variabel yang memengaruhi sukses tidaknya penerapan akuntabilitas di antaranya sebagai berikut:

1. *Transparansi*, yaitu keterbukaan bagi publik untuk menyelidiki, mengkritisi dan menganalisis kebijakan publik.
2. *Akses*, yaitu adanya akses bagi publik terhadap informasi yang relevan, kapanpun, dimanapun, oleh siapapun dengan biaya yang sangat rendah.
3. *Responsiveness*, yaitu kecepatan dalam melakukan *follow up* atas kritik, masukan, dan pendapat dari publik.
4. *Control*, yaitu berfungsinya kontrol yang ada dalam masyarakat media, NGO, dll terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas oleh pejabat publik.

5. Tanggungjawab, yaitu tanggungjawab pegawai dan pejabat publik untuk bekerja secara profesional sesuai dengan standar dan kode etik yang berlaku.

Menurut Rasul (2002) dimensi akuntabilitas ada 5 yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*); akuntabilitas manajerial; akuntabilitas program; akuntabilitas kebijakan; dan akuntabilitas finansial. Dari dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan dan disebutkan di atas, dimensi tersebut dapat diturunkan menjadi indikator akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran; akuntabilitas proses; akuntabilitas program; dan akuntabilitas kebijakan.

#### **2.2.5. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap perusahaan, yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditor (Bank atau Lembaga Keuangan), maupun pihak yang berkepentingan lainnya. Menurut Baridwan (2004: 17) dalam Riswan & Kesuma, (2014) mendefinisikan laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Menurut Sutrisno (2008: 9) dalam Riswan & Kesuma (2014) laporan keuangan merupakan hasil dari proses

akuntansi yang meliputi dua laporan utama yaitu neraca dan laporan laba rugi. Menurut Bambang Riyanto (2012: 327) dalam Rabuisa et al., (2018) Laporan Finansiil (*Financial Statement*) memberikan ikhtisar atas keadaan suatu perusahaan, dimana neraca yang mencerminkan nilai aktiva, utang, dan modal sendiri, dan laporan rugi dan laba mencerminkan atas hasil yang telah dicapai selama periode tertentu. Harahap (2008: 105) dalam Rahmayuni (2017) menyatakan bahwa laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Kasmir (2008: 7) dalam Rahmayuni (2017) menyatakan pengertian laporan keuangan secara umum adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Laporan keuangan dapat diterapkan dengan tujuan yaitu sebagai penyedia atas informasi yang berhubungan dengan posisi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat sebagai pengambilan keputusan ekonomi perusahaan (Rabuisa et al., 2018). Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk mendapatkan gambaran atas kemajuan dari pelaporan keuangan secara periodik dalam perusahaan.

Pencatatan atas yang telah dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan diharuskan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah berlaku. Sifat laporan keuangan menurut Kasmir (2013: 12) dalam Rabuisa et al., (2018) adalah bersifat historis dan menyeluruh.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Hery, 2017: 3). Laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik utama yaitu adalah relevan, andal dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut harus dipenuhi agar laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan (Martani, et al., 2014: 54).

Dilihat dari sudut pandang yang berkepentingan, ada tiga jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan untuk manajemen, laporan keuangan untuk pihak eksternal perusahaan, dan laporan keuangan untuk pihak-pihak khusus. Laporan keuangan untuk ketiga pihak tersebut disusun dan disajikan dari suatu proses akuntansi yang sama, yaitu merupakan produk dari sebuah sistem informasi akuntansi.

Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. *Financial Accounting Standards Board* menyimpulkan bahwa tujuan-tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Berguna bagi mereka yang membuat keputusan investasi dan kredit.
2. Membantu dalam memperkirakan arus kas di masa depan.
3. Mengidentifikasi sumber daya ekonomi (*asset*), klaim atas sumber daya tersebut (kewajiban) serta perubahan pada sumber daya dan klaim tersebut (Weygandt, et al., 2008: 58 dalam Riswan & Kesuma, 2014).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009: 3) dalam Riswan & Kesuma (2014) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Fahmi (2011: 28) dalam Riswan & Kesuma (2014) tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan.

Para pemakai laporan akan menggunakan laporan keuangan untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambil. Informasi mengenai dampak

keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu. Dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif (Riswan & Kesuma, 2014).

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yaitu pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengetahui lebih mendalam tentang laporan keuangan oleh perusahaan. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada beberapa pihak yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan, antara lain masyarakat, pemilik perusahaan, pemerintah, perpajakan, dan karyawan.

#### 1. Bagi Masyarakat.

Bagi masyarakat luas merupakan suatu jaminan terhadap uang yang disimpan di bank. Jaminan ini diperoleh dari laporan keuangan yang ada dengan melihat angka-angka yang ada di laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan, pemilik dana dapat mengetahui kondisi bank bersangkutan. Selain itu dengan diumumkannya laporan keuangan secara luas, maka bonafiditas dari bank yang bersangkutan akan diketahui dengan mudah, sehingga bagi calon debitur akan dapat memilih bank mana yang akan mampu membiayai proyeknya.

## 2. Bagi Pemilik/Pemegang Saham.

Bagi pemegang saham sebagai pemilik, memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan untuk kemajuan perusahaan dalam menciptakan laba dan pengembangan usaha bank tersebut. Jika dianggap tidak memuaskan maka kemungkinan manajemen yang ada sekarang segera akan diganti dan sebaliknya. Penilaian pemegang saham akan lebih ditekankan pada kemampuan manajemen dalam mengembangkan modalnya untuk memperoleh laba yang rasional, dan kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mendukung perkembangan usahanya.

## 3. Bagi Pemerintah.

Bagi pemerintah, baik bank pemerintah maupun bank swasta adalah untuk mengetahui kemajuan dan kepatuhan bank dalam melaksanakan kebijakan moneter dan pengembangan sektor-sektor industri tertentu. Mengingat kedudukannya yang sangat strategis tersebut tidaklah mengherankan apabila Bank Indonesia merasa perlu mengadakan pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta. Bahkan jika perlu akan ikut campur tangan langsung apabila ada suatu bank mengalami berbagai kesulitan yang serius, dan sudah tentu hal ini pula cukup melegakan para penyimpan dana.

#### 4. Bagi Perpajakan.

Pihak pajak akan dapat lebih mudah menjalankan tugasnya dalam menetapkan besarnya pajak perseroan bagi bank yang bersangkutan, dengan mempelajari laporan keuangan yang telah diumumkan. Hal ini karena laba bank yang bersangkutan akan terlihat jelas dari laporan laba rugi. Selain dari itu dapat untuk mengukur kewajaran laba atau rugi yang diumumkan tersebut pihak pajak juga akan dapat membandingkannya dengan bank-bank lain yang sejenis.

#### 5. Bagi Karyawan.

Karyawan berkepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan bank, sehingga mereka juga merasa perlu mengharapkan peningkatan kesejahteraan apabila bank memperoleh keuntungan dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan bank sebagai perusahaan jasa memang selayaknya kesejahteraan para karyawan harus mendapatkan perhatian yang lebih, mengingat para karyawan tersebut merupakan faktor produksinya yang utama (Rahmayuni, 2017).

#### **2.2.6. Dark Triad**

Psikolog telah mengidentifikasi tiga sifat terkait, psikopati, narsisme, dan machiavellianisme secara kolektif. Disebut sebagai “*Dark Triad*” yang semuanya secara individual terkait dengan keuangan dan perilaku maladaptif lainnya (Babiak, 1995 dalam Harrison et al., 2016). Faktor *dark triad* menggambarkan ciri-ciri kepribadian yang tampaknya mempengaruhi semua domain perilaku manusia mulai dari seksualitas hingga ideologi (Lee

et al., 2013 dalam Harrison et al., 2016). Sementara masing-masing karakteristik *dark triad* berkorelasi (Hare, 1991 dalam Harrison et al., 2016), setiap konstruksi secara konseptual berbeda dari masing-masing dua konstruksi lainnya (Paulhus dan Williams, 2002 dalam Harrison et al., 2016). Misalnya, sementara narsisme dan psikopati dikaitkan dengan impulsif, psikopati dikaitkan dengan bentuk impulsif disfungsional, sementara machiavellianisme dikaitkan dengan bentuk fungsional impulsif (Jones dan Paulhus, 2011 dalam Harrison et al., 2016). Akibatnya, narsisis mungkin berkembang dalam interaksi jangka pendek, sementara psikopat cenderung kurang kesadaran sosial dan terlibat dalam perilaku yang lebih merusak diri sendiri. Akibatnya, kesenjangan tetap ada dalam pemahaman kita tentang bagaimana faktor *dark triad* secara berbeda mempengaruhi interaksi berbasis hubungan jangka panjang versus pertukaran jangka pendek (Spain et al., 2014 dalam Harrison et al., 2016). Lebih jauh lagi, masing-masing ciri dalam *dark triad* memiliki hubungan terbalik yang kuat dengan kejujuran dan kesopanan (Lee dan Ashton, 2005 dalam Harrison et al., 2016). Individu yang tinggi dalam salah satu sifat dalam *dark triad* lebih cenderung berpartisipasi dalam perilaku mementingkan diri sendiri, tidak berperasaan, atau tidak etis seperti terlibat dalam upaya keuangan berisiko (Jones, 2014 dalam Harrison et al., 2016). Oleh karena itu, *dark triad* sering dikaitkan dengan peningkatan aktivitas kriminal, termasuk penipuan (Lee et al., 2013 dalam Harrison et al., 2016) dan perilaku tidak etis lainnya di tempat kerja (Spain et al., 2014 dalam Harrison et al., 2016).

Mereka yang memiliki machiavellianisme tinggi menggunakan perilaku curang dan percaya orang lain menjadi mudah tertipu dan bodoh. Seseorang yang dinilai tinggi pada machiavellianisme dicirikan dengan memegang pandangan sinis terhadap orang lain dan keyakinan bahwa manipulasi adalah metode yang valid dan berguna untuk mencapai tujuan (O'Boyle et al., 2012 dalam Harrison et al., 2016). Orang yang menunjukkan machiavellianisme cenderung membuat keputusan yang tidak etis dan sering berasumsi bahwa orang lain akan membuat pilihan yang sama (Fehr et al., 1992 dalam Harrison et al., 2016). Machiavellianisme telah digambarkan sebagai kesediaan untuk menggunakan curang dan bertindak tidak bermoral (Christie dan Geis, 1970 dalam Harrison et al., 2016). Akibatnya, Machiavellianisme memiliki banyak dimensi dan dikaitkan dengan amoralitas, keinginan untuk mengontrol, keinginan untuk status, dan ketidakpercayaan pada orang lain (Dahling et al., 2009 dalam Harrison et al., 2016). Individu yang berperingkat tinggi pada sifat Machiavellianisme lebih cenderung berbohong, mencuri, menipu, dan menyesatkan orang lain (Fehr et al. 1992 dalam Harrison et al., 2016). Machiavellianisme dianggap sebagai faktor yang berkontribusi terhadap perilaku bisnis yang tidak etis dari berbagai jenis (Trevino dan Youngblood, 1990 dalam Harrison et al., 2016) dan individu yang menunjukkan peringkat tinggi pada machiavellianisme lebih cenderung menipu orang lain dalam konteks organisasi (Harrell dan Hartnagel, 1976 dalam Harrison et al., 2016).

Ego seorang narsisis dan rasa berhak menciptakan keinginan untuk menyombongkan diri dan terlibat dalam perilaku mencari perhatian lainnya. Narsisis memiliki kebutuhan yang kuat untuk validasi dan narsisme umumnya dianggap sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi yang ditandai dengan kurangnya interaksi masa kanak-kanak yang berempati dan konsisten (Kernburg, 1975 dalam Harrison et al., 2016). Orang narsisis memproyeksikan rasa kebesaran tetapi memiliki kerapuhan batin dan harga diri yang rendah. Narsisme telah digambarkan sebagai pola kemegahan, fokus diri, dan kepentingan diri yang menyebar luas (Morf dan Rhodewalt, 2001 dalam Harrison et al., 2016). Aspek narsisme antara lain kesediaan untuk mengeksploitasi orang lain, hak, dan sifat mementingkan diri sendiri (Emmons, 1987 dalam Harrison et al., 2016). Orang narsisis umumnya dipandang baik selama pertemuan awal, tetapi dipandang lebih negatif dan cenderung arogansi selama interaksi berikutnya (Paulhus, 1998 dalam Harrison et al., 2016). Dengan demikian, dalam interaksi jangka pendek seperti yang melibatkan transaksi e-commerce, mereka yang memiliki sifat narsistik lebih tinggi umumnya akan lebih berhasil mendapatkan kepercayaan orang lain. Orang narsisis mengharapkan perlakuan khusus dan umumnya tidak berempati dan mau mengeksploitasi orang lain. Narsisme berorientasi pada tujuan dan ditujukan untuk mendapatkan penegasan, sementara tidak peka terhadap batasan sosial apa pun. Seorang narsisis sering menggabungkan hak dengan keinginan kuat untuk sukses dan berprestasi (Ames et al., 2006 dalam Harrison et al., 2016). Selain itu,

perilaku narsistik dan motivasi penipuan dianggap oleh auditor sebagai signifikan dan positif terkait dengan penilaian risiko penipuan dan perilaku keuangan yang tidak etis (Duchon dan Drake, 2009 dalam Harrison et al., 2016).

Mereka yang dinilai tinggi dalam psikopati telah dicirikan sebagai menunjukkan pola perilaku anti-sosial yang secara intrinsik didasarkan pada penilaian tentang peningkatan kepentingan keinginan dan kesejahteraan seseorang sementara, pada saat yang sama, meminimalkan hak dan kesejahteraan orang lain (Levenson, 1992 dalam Harrison et al., 2016). Psikopati terwujud ketika seseorang menunjukkan kurangnya rasa bersalah atau penyesalan atas tindakan yang merugikan orang lain. Seorang psikopat impulsif dan memiliki sedikit perhatian terhadap orang lain atau mekanisme pengaturan sosial (O'Boyle et al., 2012 dalam Harrison et al., 2016) dan tidak membentuk hubungan pribadi yang berarti dan akibatnya kurang empati, rasa bersalah, dan penyesalan ketika keputusan mereka menyakiti orang lain (Rabbitt, 1991 dalam Harrison et al., 2016). Psikopati ditunjukkan oleh tidak berperasaan, tanpa belas kasihan, curang, dan eksploitasi orang lain (Hare, 1991 dalam Harrison et al., 2016). Psikopat secara rutin tidak jujur dan bersedia menggunakan ketidakjujuran untuk keuntungan pribadi mereka (Karpman, 1941 dalam Harrison et al., 2016). Psikopati dapat memberikan beberapa tingkat keuntungan sosial, karena sangat terkait dengan ketegasan dan kemauan untuk mengambil risiko dan, oleh karena itu, psikopat dapat berkembang dalam bisnis, lingkungan yang kacau, dan

dalam peran kepemimpinan di mana stres tinggi (Babiak dan Rabbit, 2006 dalam Harrison et al., 2016).

Variabel *dark triad* memengaruhi berbagai keputusan yang menghasilkan perilaku tidak etis dalam rentang yang luas (Lee et al., 2013 dalam Harrison et al., 2016). Ciri-ciri ini juga mempersulit individu untuk mengembangkan dan memelihara hubungan saling percaya dengan rekan kerja mereka, dasar utama untuk mengembangkan rutinitas kerja yang produktif (Robinson dan Morrison, 1995 dalam Harrison et al., 2016). Lebih jauh, sifat *dark triad* dapat memiliki konsekuensi serius dalam hal kinerja bisnis secara keseluruhan karena telah ada dukungan empiris untuk gagasan bahwa kinerja tempat kerja yang negatif oleh individu “meracuni” kinerja tim kerja mereka (Dunlop dan Lee, 2004 dalam Harrison et al., 2016). Oleh karena itu, memahami peran yang dimainkan setiap elemen dalam *dark triad* dalam proses pengambilan keputusan adalah penting untuk memahami bagaimana orang bereaksi terhadap berbagai konteks etika.

#### **2.2.7. Perspektif Dramaturgi**

Awal dramaturgi muncul disebabkan oleh karya Erving Goffman tentang “diri” dalam *Presentation of Self in Everyday Life*. Diri dianggap sebagai produk dialektis dari “saya” atau impulsif dari “diri” dan “aku” atau sisi sosial manusia (Ritzer, 2012 dalam Fatmawati, 2018). Diri berkembang ketika seseorang belajar mengambil peranan orang lain atau masuk ke dalam pertandingan dibandingkan permainan (Syarifuddin, 2011 dalam Fatmawati, 2018).

Mead menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya berinteraksi dengan orang lain, tetapi dia juga berinteraksi dengan dirinya sendiri secara simbolis. Dalam melakukan interaksi sosial, seseorang akan belajar memahami simbol-simbol konvensional dan juga belajar menggunakannya sehingga mampu memahami peranan aktor-aktor lain. Blummer (1969) dalam Fatmawati (2018) menegaskan bahwa proses sosial yang terjadi dalam kehidupan kelompok akan menciptakan dan menghancurkan aturan-aturan, bukan aturan-aturan yang menciptakan dan menghancurkan kehidupan kelompok.

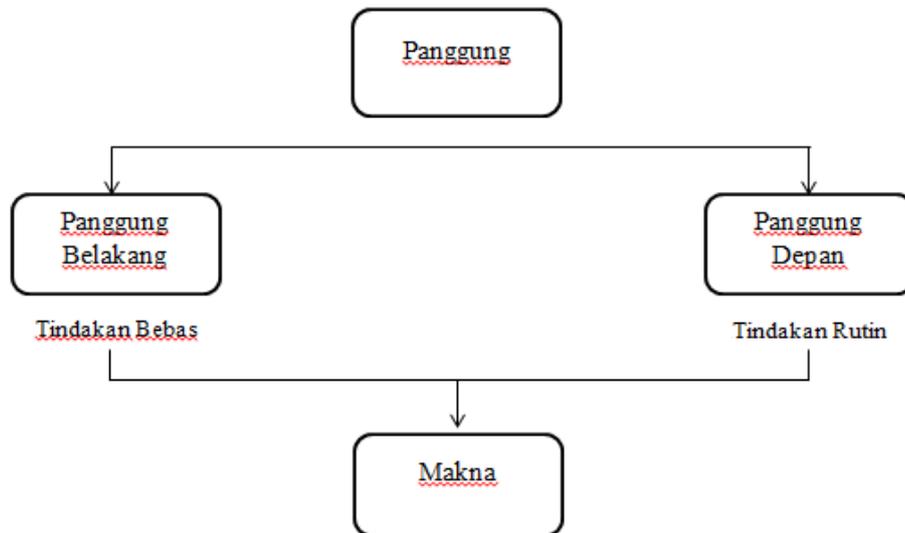
Fokus dari konsep dramaturgi Goffman adalah pandangan atas kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan yang mirip dengan pementasan drama di panggung. Inti dari dramaturgi tidak terletak pada hubungan perilaku dan penyebabnya, tetapi hubungan antara tindakan atau perilaku sosial dengan maknanya. Perspektif dramaturgi bukan mempelajari tentang hasil dari perilaku manusia, tetapi mempelajari tentang perilaku manusia dalam mencapai tujuannya. Menurut Goffman makna dalam perspektif dramaturgi adalah pencapaian problematik interaksi manusia yang penuh perubahan, kebaruan, dan kebingungan (Ritzer, 2012 dalam Fatmawati, 2018). Perspektif dramaturgi tidak berfokus pada apa yang orang lakukan atau alasan mengapa mereka melakukannya, tetapi bagaimana mereka melakukannya. Dramaturgi menekankan pada makna dari aktivitas manusia yang mengandung cara mereka mengekspresikan diri ketika melakukan interaksi dengan orang lain. Inti dari dramaturgi adalah

ketika manusia berinteraksi dengan orang lain, maka ia akan mengelola pesan yang diharapkannya tumbuh dan dimengerti oleh orang lain. Oleh sebab itu, dalam dramaturgi, manusia dipandang sebagai aktor atas panggung yang sedang memainkan peran-peran mereka.

Interaksi antara manusia di dalam dramaturgi dipahami sebagai kesepakatan perilaku yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berinteraksi sehingga dapat mencapai tujuan akhir yang diharapkan dari interaksi sosial tersebut. Interaksi sosial diartikan seperti pertunjukkan sandiwara dimana manusia sebagai aktor berusaha menggabungkan karakteristik personal dan tujuannya kepada orang lain melalui pertunjukkan dramanya sendiri. Bagi prespektif dramaturgi, ketika berinteraksi, aktor ingin menampilkan perasaan diri yang dapat diterima oleh orang lain, namun di sisi lain aktor menyadari jika penonton dapat mengganggu penampilannya (Ritzer, 2012 dalam Fatmawati, 2018). Hal tersebut kemudian mendorong aktor menyesuaikan diri dengan mengendalikan penonton, terutama dari unsur-unsur yang dapat menganggunya. Bukti nyata dari permainan peran dalam kehidupan manusia seringkali terjadi pada kehidupan masyarakat di sekitar kita. Contohnya, pada kasus kekuasaan politik, dimana para penguasa berusaha mengontrol diri mulai dari penampilan, keadaan fisik, hingga perilaku mereka agar kekuasaan mereka dipandang bagus di mata lingkungan mereka. Hal tersebut terjadi karena mereka menyadari jika seseorang menjadi seorang penguasa namun mempunyai perilaku yang buruk, maka dapat menjadi aib tersendiri.

Dramaturgi menjelaskan makna dari “diri” atau *self* layaknya karakter di panggung pertunjukkan dimana ia merupakan produk dari naskah dalam situasi sosial, tempat tiap-tiap individu saling mempengaruhi satu sama lain sehingga diri mudah terganggu selama penampilannya (Syarifuddin, 2011 dalam Fatmawati, 2018). Dalam dramaturgi, konsep diri (*self*) dapat memberi makna apabila diri di dalam situasi sosial, berkembang, dan mengatur berbagai interaksi sosial. Di dalam bukunya *The Presentation of Self in Everyday Life*, Goffman menjelaskan interaksi sosial sebagai kehidupan layaknya teater, dengan pertunjukkan di atas panggung, dan menampilkan berbagai peran yang ditampilkan oleh para aktor. Dalam memainkan perannya, aktor harus memusatkan perhatiannya dan menjaga kendali diri agar dapat mengekspresikan peran yang sesuai dengan situasi.

Dalam teori dramaturgi Ervin Goffman (1959) terdapat 2 (dua) konsep penting, yaitu: panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Panggung depan merupakan ruang publik yang digunakan seseorang atau sekelompok orang untuk mempresentasikan diri dan memberi kesan kepada orang lain. Panggung belakang ialah ruang pribadi yang tidak diketahui orang lain dimana tempat seseorang atau sekelompok orang leluasa menampilkan wajah aslinya.



Sumber: Pradana dan Meiden (2016) dalam Fatmawati (2018)

### Gambar 2.1. Konsep Panggung Dramaturgi

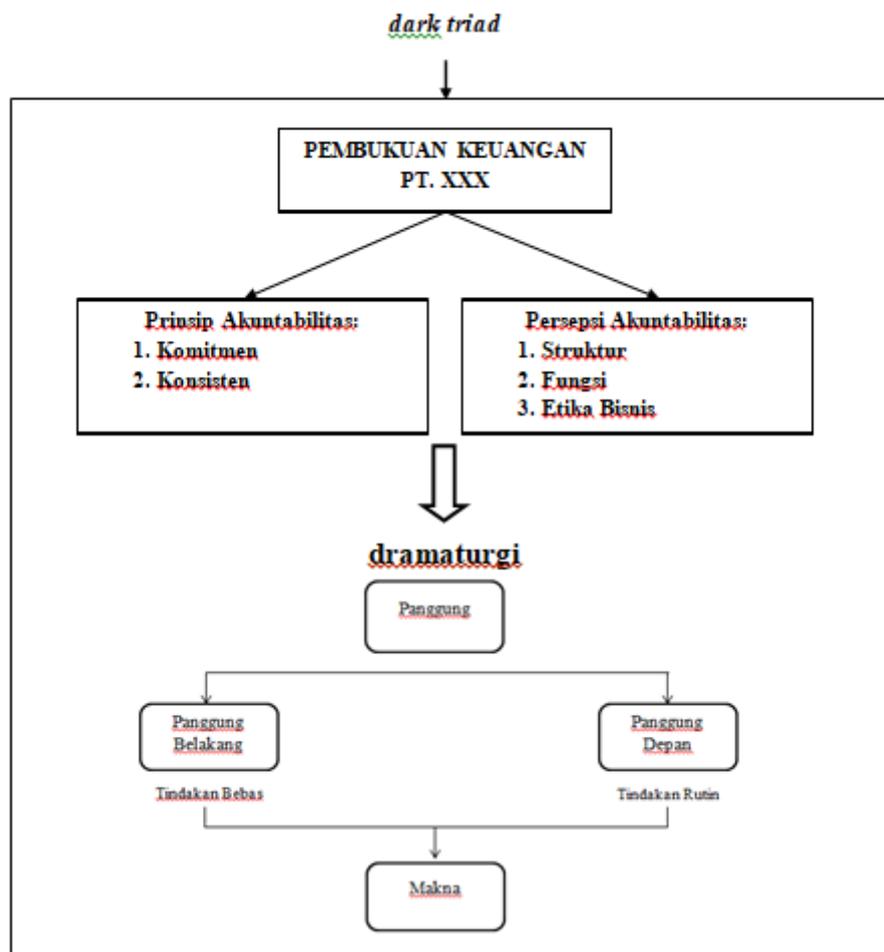
Bagian panggung depan (*front stage*) kemudian dibagi lagi menjadi set panggung (*setting*) dan perangkat pribadi (*front personal*). *Setting* mengacu pada atribut atau situasi fisik yang harus ada ketika aktor memainkan perannya. Karena menurut Ritzer (2012), tanpa adanya *setting*, biasanya aktor tidak dapat memainkan perannya. *Front personal* adalah perangkat atau alat peraga yang mampu membuat penonton mengenali peran aktor, seperti peralatan dan pakaian. Hal-hal yang terkait dengan penampilan dan tingkah laku termasuk ke dalam *front personal*. Hal terpenting dari dramaturgi adalah para aktor umumnya ingin menyajikan diri mereka dengan rupa yang ideal. Aktor mempunyai kecenderungan merasa perlu untuk menyembunyikan sebagian aspek dari diri mereka dari penonton ketika pertunjukan berlangsung. Sisi lain tersebut hanya akan dimunculkan ketika berada di panggung belakang (Fatmawati, 2018).

### 2.3. Kerangka Konseptual

*Corporate Governance* menurut Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) yaitu seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan

antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal maupun eksternal lain, mengenai hak dan kewajiban entitas, atau sistem dimana perusahaan diatur dan dikendalikan. Tujuan *Corporate Governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* (Oktaviani, 2015 dalam Amalia, 2018). Salah satu prinsip *Good Corporate Governance* adalah akuntabilitas, yaitu perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerja dengan optimalisasi peran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas serta fungsi secara profesional. Tetapi pada kenyataannya Dewan Direksi dan Dewan Komisaris belum berperan secara optimal yang menyebabkan terjadinya permasalahan mengenai tindakan mengatur laporan keuangan oleh “aktor”. *Dark triad* adalah istilah yang mengacu pada kombinasi dari tiga ciri psikologis yang, bila hadir dalam kombinasi, dianggap dapat memprediksi sikap dan perilaku tidak berperasaan, melayani diri sendiri, dan curang. Hubungan antara kepribadian *dark triad* “aktor” dan tindakan mengatur laporan keuangan tersebut adalah saling berhubungan.

Berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu di atas, maka kerangka konseptualnya yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual